BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah suatu badan milik pemerintah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

VISI

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang representatif sesuai dengan standar efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

MISI

1. Mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan melalui pajak daerah.
3. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang representatif sesuai standar, tertib, optimal dan akuntabel.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Berikut susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta:

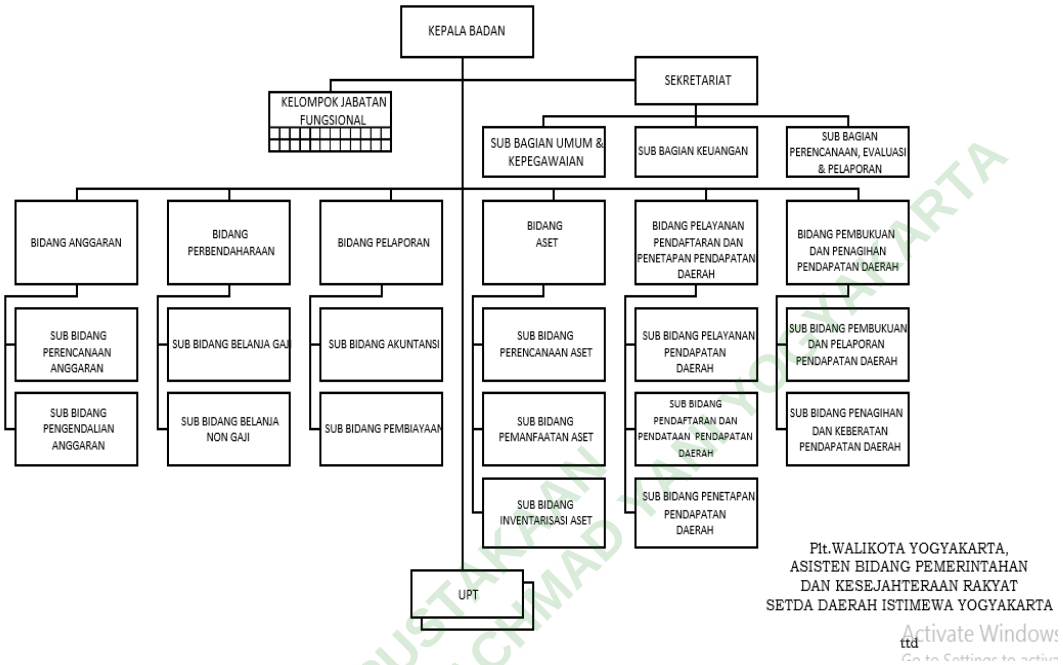

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, terdiri atas:

1) Subbidang Umum dan Kepegawaian.

Tugas:

a) Melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian badan.

2) Subbidang Keuangan dan

Tugas:

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

a) Melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiaatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan badan.

3) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

Tugas:

a) Melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan.

c. Bidang Anggaran, terdiri atas:

1) Subbidang Perencanaan Anggaran dan

Tugas:

a) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan perencanaan anggaran daerah.

2) Subbidang Pengendalian Anggaran.

Tugas:

a) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengendalian anggaran daerah.

d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:

1) Subbidang Kas Daerah dan

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Tugas:

a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan kas daerah.

2) Subbidang Belanja Daerah.

Tugas:

a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan administrasi belanja daerah.

e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas:

1) Kelompok Substansi Perencanaan Aset Daerah

Tugas:

a) Melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan perencanaan aset daerah.

2) Kelompok Pemanfaatan Aset Daerah dan

Tugas:

a) Melakukan penyiapan bahan prumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pemanfaatan aset daerah.

3) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah

Tugas:

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

a) Melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengawasan dan pengendalian aset daerah.

f. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Daerah, terdiri atas:

1) Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah

Tugas:

a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pelayanan pendapatan daerah.

2) Kelompok Substansi Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah.

Tugas:

a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah.

3) Subbidang Penetapan Pendapatan Daerah.

Tugas:

a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

dan pemberian bimbingan kegiatan penetapan pendapatan daerah.

g. Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

1) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan daerah.

Tugas:

a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.

2) Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah dan

Tugas:

a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan penagihan dan keberatan pendapatan daerah.

3) Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Daerah.

Tugas:

a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengembangan pendapatan daerah.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:

1) Subbidang Akuntansi dan

Tugas:

a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan akuntansi anggaran daerah.

2) Subbidang Pelaporan.

Tugas:

a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pelaporan pendapatan daerah.

i. Unit Pelaksana Teknis dan

Tugas:

1) Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

j. Kelompok Pejabat Fungsional.

Tugas:

1) Melaksanakan fungsi dan tugas pelaksanaan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diuraikan di atas maka dapat menjadi tambahan informasi peneliti terkait tugas masing-masing

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

bidang di BPKAD Kota Yogyakarta. Hal tersebut sejalan dengan data yang dibutuhkan penelitian ini yaitu terkait pelaporan yaitu data realisasi penerimaan pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah yang didapat dari bidang akuntansi dan pelaporan, kemudian data yang berisi prosedur penagihan pajak parkir yang didapat dari subbidang penagihan dan keberatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu seperti laporan pertanggung jawaban atau laporan APBD Kota Yogyakarta, target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, target dan realisasi pajak daerah khususnya pajak parkir serta dokumen yang berisi prosedur penagihan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode tahun 2018-2021.

Data primer penelitian ini yaitu didapatkan melalui wawancara langsung kepada daftar informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui prosedur penagihan yang ada di BPKAD dalam menjaga efektivitas pajak parkir yang berdampak pada kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah sehingga tetap optimal. Penelitian ini membahas 3 (tiga) pokok pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Yogyakarta antara tahun 2018-2021, kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta antara tahun 2018-2021 dan prosedur penagihan pajak kepada wajib pajak parkir dalam rangka untuk menjaga optimalisasi efektivitas penerimaan pajak parkir.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah dari BPKAD periode tahun 2018-2021 hasil data yang didapat tersebut yaitu:

4.1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Pada Tahun 2018-2021.

Tabel 4. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2018	613.800.504.337	667.493.076.470
2.	2019	653.011.939.633	689.049.725.509
3.	2020	476.918.678.411	563.174.371.396
4.	2021	515.007.357.172	598.121.885.337

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

Pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta berdasarkan tabel 4.1 di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2018-2021, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta setiap tahunnya melibihi target yang telah ditetapkan.

Berikut grafik terget dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta periode 2018-2021:

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

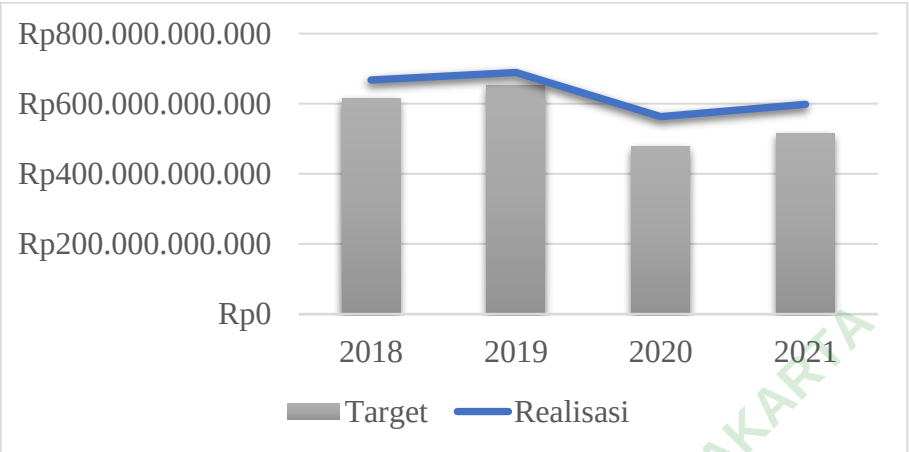

Gambar 4. 2
Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas menyatakan bahwa target dan realisasi penerimaan PAD di Kota Yogyakarta antara tahun 2018-2021 mengalami penurunan dan peningkatan yaitu pada tahun 2019 PAD mengalami peningkatan, kemudian turun pada tahun 2020, hingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan, namun pencapaian tersebut masih di bawah tahun 2019 dan jika dilihat kembali maka target yang ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, hal ini dilatarbelakangi adanya pandemi yang terjadi pada awal tahun 2020 kemudian mengakibatkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat dari pemerintah sehingga berdampak pada pendapatan daerah.

4.1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Pada Tahun 2018-2021

Hasil perhitungan tingkat efektivitas serta kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD di Kota Yogyakarta antara tahun 2018-2021 diawali dengan menguraikan terlebih dahulu realisasi dan target

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

penerimaan pajak parkir pada tahun 2018 sampai 2021 berdasarkan dokumen yang diperoleh dari BPKAD Kota Yogyakarta. Adapun realisasi serta target penerimaan pajak parkir antara tahun 2018-2021 yaitu:

Tabel 4. 2
Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021

NO	Tahun	Target	Realisasi
1.	2018	Rp3.500.000.000	Rp3.525.732.992
2.	2019	Rp3.675.000.000	Rp3.050.479.181
3.	2020	Rp1.600.000.000	Rp1.851.049.591
4.	2021	Rp2.000.000.000	Rp2.034.806.805

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak parkir periode 2018-2021 melebihi target yang telah ditentukan. Target yang ditentukan oleh BPKAD Kota Yogyakarta di tahun 2020 dan 2021 lebih kecil dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, hal ini juga bersamaan dengan adanya pandemi covid 19 yang terjadi pada awal tahun 2020. Tahun 2021 pandemi covid 19 masih menyebar di Indonesia hal ini menyebabkan pemerintah harus mengambil kebijakan untuk memutus rantai penularan virus covid-19.

Bentuk pengendalian pemerintah dalam menghadapi pandemi yaitu dengan memberlakukan pembatasan terhadap mobilitas masyarakat, namun adanya kebijakan tersebut juga berdampak kepada wajib pajak parkir, karena ditutupnya tempat wisata serta kawasan perdagangan yang ada di Jogja, maka hal tersebut juga menurunkan pendapatan dari penyelenggara parkir.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

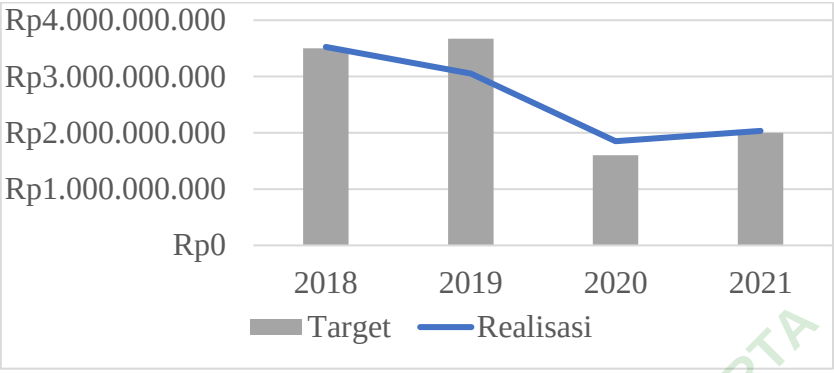

Gambar 4. 3
Grafik Fluktuasi Realisasi dan Target Pajak Parkir Periode Tahun 2018-2021

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas menjelaskan bahwa target serta realisasi penerimaan pajak parkir di tahun 2020-2021 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018-2021. Hal ini disebabkan pada masa pandemi pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan PPKM sebagai upaya untuk memutus penularan covid-19 di Indonesia. Adanya kebijakan tersebut juga menurunkan pendapatan wajib pajak penyelenggara parkir sehingga pajak yang dibayarkan akan mengalami penurunan dengan menyesuaikan pendapatan dari penyelenggara parkir.

4.1.4 Prosedur Penagihan Pajak Parkir

Berdasarkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berisi prosedur penagihan pajak daerah pada subbidang penagihan dan keberatan yaitu:

1. Subbidang Penagihan dan Keberatan
   a. Menerima daftar realisasi dan daftar tunggakan pajak daerah dari subbidang Pembukuan dan Pelaporan.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

b. Menerima daftar SKPD/SKPDKB/SKPDKBT dan daftar SK angsuran pajak dari Subbidang Penetapan.

2. Petugas Monitoring memberikan:
   a. Daftar Surat Teguran.
   b. Surat Teguran

   Kemudian menyerahkan ke Ka.Subbidang Penagihan dan Keberatan.
3. Ka. Subbidang Penagihan dan Keberatan menerima surat daftar teguran dan surat teguran. Jika setuju diserahkan ke Ka. Bidang Pajak. Jika tidak maka akan dikembalikan untuk diperbaiki.
4. Ka. Bidang P3D menerima Daftar Surat Teguran dan Surat Teguran dari Ka.Sub Bidang Penagihan dan Keberatan, jika setuju akan ditandatangani dan diteruskan untuk ditandatangani oleh Ka. BPKAD.
5. Ka. BPKAD menerima Daftar Surat Teguran dan Surat Teguran dan Menyerahkan ke Petugas Pengirim Penyerah.
6. Petugas monitoring tunggakan menerima Daftar Surat Teguran dan Surat Teguran dan menyerahkan ke petugas Pengirim Penyerah.
7. Petugas Pengirim Penyerah mengirim dan menyerahkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak dan mengarsipkan Daftar Surat Teguran.
8. Petugas Penagih memantau realisasi hasil Surat Teguran yang dikirim kepada Wajib Pajak, jika dalam waktu 7 hari kerja belum terdapat realisasi maka petugas tagih melakukan kunjungan door to door ke wajib pajak untuk melakukan penagihan.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan terkait dengan alur proses penagihan yang dilakukan oleh BPKAD dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak daerah. Alur penagihan tersebut memperlihatkan ketegasan pemerintah Kota Yogyakarta dalam merealisasikan pajak daerah khususnya pajak parkir tetap optimal sehingga perlu diadakan penagihan kepada wajib pajak parkir yang menunggak pembayaran. Hasil observasi ke BPKAD Kota Yogyakarta selain prosedur penagihan yaitu terkait surat pernyataan wajib pajak yang mengajukan keberatan atas pajak yang telah jatuh tempo.

Surat Keberatan berisi pernyataan wajib pajak yang disebabkan ketika dilakukan penagihan namun belum bisa membayarkan pajaknya sehingga menyampaikan permohonan keberatan kepada BPKAD Kota Yogyakarta agar diberikan dispensasi berupa penghapusan denda wajib pajak karena usahanya terdampak Covid-19.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Analisis Efektivitas

Menurut (Yani, 2020) efektivitas merupakan suatu hubungan dari *output* dan tujuan atau sebuah tolak ukur tingkat *output* dan prosedur dari suatu organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara operasi sektor publik karena adanya tingkat keberhasilan. Efektif adalah apabila suatu kegiatan mempunyai pengaruh pada kemampuan menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Rumus efektivitas menurut Pekei (2016):

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ penerimaan\ pajak}{Target\ penerimaan\ pajak}\ X\ 100\%$$

Berikut kategori tingkat efektivitas antara lain:

Tabel 4. 3
Tingkat Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Pekei (2016).

1. Perhitungan Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir

Berikut data serta perhitungan efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Yogyakarta antara tahun 2018-2021 yaitu:

Tabel 4. 4
Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir Tahun 2018-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2018	3.500.000.000	3.525.732.992	100,74%	Sangat Efektif
2019	3.675.000.000	3.050.479.181	83,01%	Cukup Efektif
2020	1.600.000.000	1.851.049.591	115,69%	Sangat Efektif
2021	2.000.000.000	2.034.806.805	101,74%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menjelaskan bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir pada tahun 2018 adalah 100,74% yang berarti masuk dalam kategori sangat efektif, namun pada tahun 2019 efektifitas turun menjadi 83% dan masuk dalam kategori cukup efektif. Tahun 2020 sekaligus menjadi awal terjadinya pandemi covid 19 yang mengakibatkan pemerintah untuk mengambil langkah dengan cara PPKM khususnya pulau jawa, sehingga kebijakan tersebut juga

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

berdampak pada penurunan pendapatan wajib pajak dari penyelenggara parkir. Tahun 2020 dan 2021 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di atas 100% sehingga masuk dalam kategori sangat efektif, namun dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020-2021 target yang ditetapkan lebih rendah.

4.2.2. Analisis Kontribusi

Menurut Yani (2020), semakin besar hasilnya berarti akan meningkatkan peranan pajak daerah terhadap PAD, dan sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD semakin rendah. Semakin besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah maka semakin besar pula peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan sebaliknya semakin kecil kontribusi pajak daerah dan kontribusi daerah terhadap PAD maka semakin kecil pula peranan pajak daerah dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Rumus kontribusi (Yani, 2020):

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ penerimaan\ pajak}{Target\ penerimaan\ PAD}\ X\ 100\%$$

Kriteria dari tingkat kontribusi pajak parkir terhadap PAD antara lain:

Tabel 4. 5
Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Yani (2020)

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

1. Perhitungan Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2018-2021.

Tabel 4. 6
Perhitungan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Kontribusi	Keterangan
2018	667.493.076.470	3.525.732.992	0,53%	Sangat Kurang
2019	689.049.725.509	3.050.479.181	0,44%	Sangat Kurang
2020	563.174.371.397	1.851.049.591	0,33%	Sangat Kurang
2021	598.121.885.338	2.034.806.805	0,34%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menjelaskan bahwa tahun 2018-2021 kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD di Kota Yogyakarta masih dibawah 10% sehingga masuk dalam kategori kurang berkontribusi. Tahun 2020-2021 target penerimaan pajak parkir juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini dilatarbelakangi oleh pandemi covid-19 yang melanda Indonesia di awal tahun 2020. Perbandingan target penerimaan pajak parkir sebelum pandemi yaitu tahun 2018-2019 lebih tinggi dibandingkan setelah terjadinya pandemi yaitu tahun 2020-2021 sehingga hal tersebut juga berdampak pada penurunan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD di Kota Yogyakarta.

4.2.3. Analisis Data Hasil Wawancara

Hasil wawancara dianalisis sebagai upaya untuk menjelaskan temuan peneliti ketika secara langsung melakukan interview kepada informan peneliti terkait dengan prosedur penagihan yang digunakan

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

oleh subbidang penagihan dan keberatan di BPKAD Kota Yogyakarta saat melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak parkir. Berikut alur pengambilan data yang dilakukan peneliti saat akan melakukan pengumpulan data di BPKAD Kota Yogyakarta:

1. Mengajukan surat pengajuan izin penelitian.
2. Peneliti mendatangi BPKAD Kota Yogyakarta untuk melakukan konfirmasi kepada sekretariat badan, kemudian menentukan data apa saja yang dibutuhkan peneliti, serta melakukan kesepakatan waktu untuk melakukan wawancara di kemudian hari kepada pihak yang relevan dengan penelitian, dalam hal ini yaitu subbidang akuntansi dan pelaporan kemudian subbidang penagihan dan keberatan.
3. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara serta melakukan scan dokumen yang relevan dengan penelitian sekaligus menentukan jadwal terkait *member check* kepada informan.
4. Peneliti mengkonfirmasi data hasil penelitian kepada informan.
5. Informan menyepakati hasil data peneliti yang menjelaskan bahwa telah sesuai dengan yang ada di lapangan.
6. BPKAD Kota Yogyakarta menerbitkan Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa peneliti benar melakukan penelitian dan wawancara.

Berikut proses analisis data hasil wawancara terkait prosedur penagihan dan keberatan dengan menggunakan metode analisis model Miles dan Huberman:

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa transkrip wawancara yang ditujukan kepada subbidang penagihan dan keberatan untuk mengetahui prosedur yang digunakan saat proses penagihan pajak daerah kepada wajib pajak. Observasi dalam penelitian ini dibuktikan dengan adanya foto informan pada Lampiran 5. Berikut data hasil wawancara yang diperoleh peneliti terkait prosedur penagihan yaitu:

1) Prosedur penagihan yang dilakukan oleh subbidang penagihan dan keberatan.

   Jawaban informan:

   a) "Untuk prosedur penagihan itu berarti udah ada ketetapan dulu nih dari subbidang penetapan, nah itulah yang kita tagih, nanti itukan bentuknya data tunggakan gitu kan, itulah nanti yang kita tagih biasanya pertama kita kirim surat teguran dulu,dan apabila nanti WP akan mengajukan keberatan maka harus ada surat pernyataan tertulis dari WP tersebut"(I1.11).

   b) "Biasanya kalau setiap bulan jatuh tempo itu kami menerbitkan surat teguran atau surat himbauan pembayaran namun jika beberapa kali tidak ada respon sejak surat tersebut dikirimkan akan diadakan pemanggilan dengan bekerja sama dengan satpol pp, tapi sekarang hanya sebatas dipanggil ke kantor aja"(I2.9).

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

c) "Pertama didata dulu, habis itu kalau pajak parkir tu kan dia self assessment yang jadi dia sendiri yang harus lapor, setor juga nanti atas yang dia setorkan nanti kita periksa, nanti jika hasilnya nihil udah berhenti sampai itu saja. Tapi jika ada kurang bayar nanti kita lihat datanya nanti biasanya kalau ada tunggakan untuk daftar WP yang masih ada tunggakan aku pilah per kelurahan. Dan nanti sudah ada timnya misal tim 1 itu kelurahan mana saja,dan yang lain kemana saja gitu"(I3.14).

2) Perlawanan wajib pajak saat proses penagihan

Jawaban informan:

a) "Tergantung wajib pajaknya, ada yang nggeh nggeh aja tapi gaada respon, ada yang kurang setuju dikit gitu kemudian lepas tangan ada"(I1.18).

b) "Biasanya untuk WP-WP yang susah itu ada, ada yang ikut dengan arahan kita, dan ada juga WP yang masih mengelak, misal menunda pembayaranya"(I2.16).

c) "Banyak sekali alasanya mulai dari kita udah pailit, itu labanya ga seberapa ada juga yang janjian hari ini tapi ditungguin ga datang, kemudian janjian lagi dan tidak datang lagi, kek gitu, banyak si alasanya"(I3.28).

3) Peningkatan realisasi penerimaan pajak dari adanya prosedur yang berlaku saat ini.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Jawaban informan:

a) “Sebenarnya kalau terkait realisasi lebih tergantung ada kesadaran wajib pajaknya si”(I1.22).

b) “Meningkatkan, karena semenjak ada penagihan yang cukup tegas itu WP takut juga jika nanti dipanggil kejaksaan apalagi ada monitoring KPK yang membuat WP yang kurang patuh melunak dan akhirnya membayar pajak sesuai masanya”(I2.18).

c) “Kalau sebelumnya kan SOP penagihan hanya penagihan lapangan sama surat teguran, tapi kalau sekarang kan ada pemanggilan WP juga jadi ya lumayan ada peningkatan walaupun tidak banyak”(I3.30).

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dilakukan untuk merangkum data penelitian yang diperoleh selama di lapangan kemudian memilih data yang relevan dengan penelitian dan mengeliminasi data yang tidak relevan dengan penelitian. Analisis hasil wawancara terkait prosedur penagihan yang ada di subbidang penagihan dan keberatan. Menurut Sugiyono (2018) mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang relevan dengan penelitian kemudian dicari pola dan intisari melalui sintesisasi.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Sintesisasi dalam tahap dimana hasil wawancara yang telah dikategorikan dihubungkan satu dengan yang lain untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan. Berikut sintesisasi berdasarkan hasil jawaban informan yang telah dikategorikan berdasarkan pertanyaan peneliti saat wawancara yaitu:

Tabel 4. 7
Sintesisasi hasil wawancara

Topik Pertanyaan	Informan	Hasil Wawancara	Sintesisasi
Prosedur penagihan subbidang penagihan dan keberatan	1	Jika sudah terdapat ketetapan dari subbidang penetapan, dan terdapat tunggakan maka setelah itu akan dikirim surat teguran dan apabila ada keberatan dari WP maka harus memberikan surat pernyataan secara tertulis kepada badan	Terdapat tunggakan Wajib pajak
	2	Setelah surat himbauan atau surat teguran tidak ada tanggapan maka akan diadakan pemanggilan bekerja sama dengan satpol pp	Surat teguran tidak ada tanggapan
	3	Pendataan hasil perhitungan wajib pajak kemudian setelah dilaporkan akan diperiksa apakah perhitungannya sudah tepat atau pajak yang seharusnya dibayar sesuai atau belum, jika belum sesuai atau kurang maka terdapat tunggakan	Perhitungan tidak sesuai

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

Topik Pertanyaan	Informan	Hasil Wawancara	Sintesisasi
		dan akan dikirimkan surat teguran	
Perlawanan wajib pajak saat proses penagihan	1	Terdapat wajib pajak yang terlihat patuh namun tidak kunjung merealisasikan kewajibanya	Tidak ada realisasi pajak
	2	Ada wajib pajak yang mengelak dan ada wajib pajak yang memang sengaja menunda pembayaran	Wajib pajak menunda pembayaran
	3	Terdapat wajib pajak tidak tepat janji	Wajib pajak tidak menepati janjinya
Peningkatan realisasi penerimaan pajak dari adanya prosedur yang berlaku saat ini	1	Realisasi tergantung pada kesadaran wajib pajak itu sendiri	Wajib pajak tidak memiliki kesadaran
	2	Penagihan yang tegas berupa pemanggilan wajib pajak, pengiriman surat teguran, hingga sampai sita membuat wajib pajak takut dan membayarkan pajaknya, hal tersebut hanya ada pada prosedur yang saat ini berlaku	Ketakutan wajib pajak baru membayarkan pajaknya
	3	Perbedaan SOP yang lama dengan yang terbaru yaitu terdapat pemanggilan WP yang tidak membayarkan pajaknya atau kurang bayar pada SOP saat ini	SOP lama tidak ada pemanggilan

Sumber: Data Diolah

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan dan sejenisnya. Berdasarkan hasil

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

reduksi data di atas maka penyajian data dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk uraian singkat yaitu:

Hasil sintesisasi terkait prosedur penagihan pada subbidang penagihan dan keberatan yaitu penerbitan surat teguran kepada wajib pajak didasari dengan adanya tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Proses penagihan selanjutnya yaitu dengan mengirimkan surat teguran sesuai dengan jumlah wajib pajak yang tertera pada daftar tunggakan. Ketika wajib pajak tidak menanggapi penerbitan surat teguran yang telah dikirimkan maka akan dilakukan prose pemanggilan. Ketidaktepatan perhitungan pajak yang terutang juga menjadi dasar diterbitkannya surat teguran kepada wajib pajak. Sintesisasi tersebut menjelaskan pentingnya ketepatan perhitungan serta kepatuhan yang dilakukan kepada wajib pajak, sehingga perlu adanya arahan serta bimbingan dari BPKAD Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil sintesisasi terkait perlawanan wajib pajak saat proses penagihan yaitu perlawanan wajib pajak saat dilakukan saat penagihan. Proses penagihan dilakukan karena adanya ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak terutangnya, kemudian sengaja menunda pembayaran pajaknya dan wajib pajak tidak menepati janjinya. Hasil sintesisasi tersebut menjelaskan bahwa perlawanan wajib pajak saat proses penagihan yang dilakukan oleh subbidang penagihan dan keberatan yaitu

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

adanya wajib pajak yang tidak patuh, wajib pajak sengaja menunda pembayaran pajaknya dan wajib pajak tidak menepati janjinya untuk membayarkan pajaknya saat jatuh tempo.

Wajib pajak yang telah berjanji akan datang ke subbidang penagihan dan keberatan sebagai upaya itikad baik dari wajib pajak namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak. Peningkatan ketegasan tidak hanya dilakukan saat penagihan, namun sosialisasi terkait transparansi realisasi penerimaan pajak serta manfaat pajak tersebut kepada wajib pajak atau pemberian *reward* kepada wajib pajak daerah yang memiliki kesadaran dan kepatuhan yang baik sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak terutangnya.

Hasil sintesisasi terkait peningkatan realisasi penerimaan pajak dari adanya prosedur yang berlaku saat ini yaitu wajib pajak kurang memiliki kesadaran sehingga menghambat realisasi penerimaan pajak, sehingga diperlukan pemanggilan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya, hal tersebut diadakan setelah adanya pembaharuan proses penagihan pada SOP sebelumnya yaitu diadakan pemanggilan wajib pajak. Sintesisasi tersebut menggambarkan peningkatan realisasi penerimaan pajak dari SOP yang saat ini berlaku tidak akan maksimal apabila dalam proses penagihannya masih terdapat wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran,wajib pajak harus dibuat takut terlebih dahulu baru

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

membayarkan pajaknya, dan adanya pemanggilan pajak. Membentuk tim khusus yang terjun ke lapangan dalam rangka untuk secara langsung menagih kepada wajib pajak yang tidak patuh setelah beberapa kali dikirim surat teguran namun tidak ada tanggapan dan sekaligus membuat perjanjian tertulis kepada wajib pajak terkait konsekuensi apabila wajib pajak masih tidak membayarkan pajaknya tanpa alasan, mengingat sifat pajak adalah memaksa.

d. Penarikan Kesimpulan Hasil Wawancara

Berdasarkan analisis hasil wawancara kepada 3 pegawai subbidang penagihan dan keberatan BPKAD Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa faktor yang mendukung keberhasilan dalam merealisasikan penerimaan pajak parkir adalah berdasarkan kesadaran wajib pajak sendiri. Kenyataan saat dilapangan, proses penagihan pajak daerah dilatar belakangi oleh ketidaktepatan perhitungan wajib pajak, tidak ada realisasi penerimaan pajak saat jatuh tempo sehingga diperlukan ketegasan dalam penagihan. Monitoring kepada wajib pajak juga dapat dilakukan agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait hak dan kewajibannya.

Perlawanan wajib pajak saat proses penagihan yaitu berupa adanya ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak terutangnya, kemudian sengaja menunda pembayaran pajaknya

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

dan wajib pajak tidak menepati janjinya. Peningkatan ketegasan dari BPKAD diperlukan saat melakukan penagihan kepada wajib pajak daerah. Penyampaian transparansi realisasi penerimaan pajak serta manfaat pajak kepada wajib pajak atau pemberian *reward* kepada wajib pajak daerah yang memiliki kesadaran dan kepatuhan yang baik perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak terutangnya.

Kendala yang dihadapi subbagian penagihan dan keberatan dalam melakukan penagihan sebagai upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah sesuai SOP yaitu wajib pajak kurang memiliki kesadaran sehingga menghambat realisasi penerimaan pajak daerah. SOP sebelumnya tidak ada pemanggilan wajib pajak atau hanya sebatas diberikan surat teguran. Membentuk tim khusus yang terjun ke lapangan dapat dipergunakan untuk secara langsung melakukan penagihan kepada wajib pajak yang tidak patuh setelah dikirim surat teguran namun tidak ada tanggapan akan dilakukan penagihan yang lebih tegas lagi seperti penyitaan aset sehingga ketidakpatuhan dari wajib pajak daerah dapat teratasi.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

4.3. Pengujian Keabsahan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis peneliti maka untuk melakukan pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) cara yaitu meningkatkan ketekunan, menggunakan triangulasi sumber dan mengadakan *member check.* Pengujian tersebut dilakukan agar data yang diperoleh selama

penelitian dapat dipercaya dan hasil penelitian valid dengan yang terjadi dilapangan. Berikut proses pengujian keabsahan dari penelitian ini yaitu:

4.3.1. Meningkatkan ketekunan

Sebagai upaya untuk meningkatkan ketekunan dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca teori yang digunakan serta hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti selama berada di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh peneliti telah benar.

4.3.2. Triangulasi

Untuk menguji kredibilitas hasil penelitian ini maka peneliti maka peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu menentukan 3 informan dari subbidang penagihan dan keberatan untuk memperoleh keabsahan data terkait hasil analisis terkait prosedur penagihan di BPKAD Kota Yogyakarta. Berikut hasil triangulasi sumber dari penelitian ini yaitu:

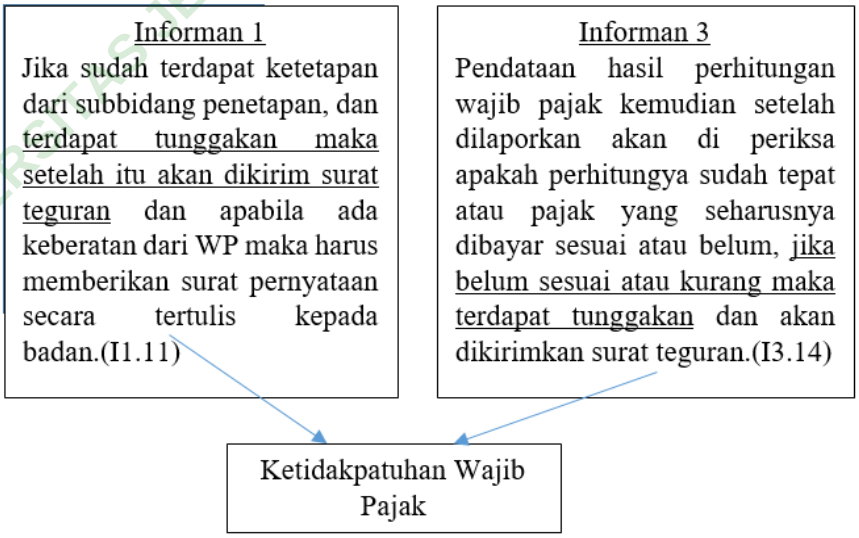

Gambar 4. 4
Triangulasi Sumber

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak parkir seperti adanya penunggakan dan tidak ada tanggapan ketika diberikan surat teguran. BPKAD Kota Yogyakarta sebagai badan yang bersentuhan langsung dengan realisasi penerimaan pajak parkir, melalui subbidang penagihan dan keberatan maka perlu adanya proses penagihan kepada wajib pajak sesuai SOP yang berlaku. Adanya proses penagihan tersebut adalah sebagai bentuk untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah khususnya pajak parkir.

4.3.3. *Member Check*

Setelah peneliti melakukan analisis data yang diperoleh selama berada di lapangan yaitu 3 informan dari subbidang akuntansi pelaporan untuk memperoleh keabsahan data yang diperoleh berdasarkan hasil analisis efektifitas pajak parkir dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah tahun 2018-2021 dan 3 informan dari subbidang penagihan dan keberatan untuk memperoleh keabsahan data terkait prosedur penagihan berdasarkan hasil wawancara. Berikut daftar informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 4. 8
Daftar Informan Penelitian

No	Kode	Nama	Jabatan	Devisi
1.	I1	Salomo Saragi, A.Md, A.Pj.	Pengolah Data Penagihan Pajak	Subbidang penagihan dan keberatan
2.	I2	Sekar Arum Kusuma Jati, A.Md, A.Pj.	Pengolah data Penagihan Pajak	Subbidang penagihan dan keberatan

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

No	Kode	Nama	Jabatan	Devisi
3.	I3	Nurul Amalia Hartono, A.Md, Ak.	Juru Sita	Subbidang penagihan dan keberatan
4	I4	Pambudi Raharjo, A. Md., Ak.	Analis Laporan Keuangan	Subbidang akuntansi dan pelaporan
5.	I5	Dina W. R., S.E	Analis Laporan Keuangan	Subbidang akuntansi dan pelaporan
6	I6	Isah, S.Akun.	Analis Laporan Keuangan	Subbidang akuntansi dan pelaporan

Sumber: Data Diolah

Peneliti selanjutnya melakukan member check kepada informan yang berkontribusi pada penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh peneliti telah sesuai dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga data yang dianalisis dapat disebut kredibel/dapat dipercaya. Berikut contoh isi surat pernyataan kesepakatan dari informan berdasarkan bidangnya masing-masing antara lain:

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

LEMBAR *MEMBERCHECK* HASIL PENELITIAN

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pambudi Raharjo, A.Md

Jabatan : Analis LK

Dengan ini menyatakan bahwa data yang diperoleh peneliti atas nama Muhammad Choirul Anam dengan NPM 182301019 dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dalam penelitianya yang berjudul"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta" adalah benar dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Yogyakarta, 14 Juni 2022

Informan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(Pambudi Raharjo, A.Md)

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

Gambar 4. 5
Surat Pernyataan *Member Check*

2. Subbidang penagihan dan keberatan

LEMBAR *MEMBERCHECK* HASIL PENELITIAN

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Amalia H, A.Md.Ak.

Jabatan : Juru Sita

Dengan ini menyatakan bahwa data yang diperoleh peneliti atas nama Muhammad Choirul Anam dengan NPM 182301019 dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dalam penelitianya yang berjudul"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta" adalah benar dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Yogyakarta, 17 Juni 2022

Informan

(Nurul Amalia H.)

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Gambar 4. 6
Surat Pernyataan Member Check

4.4. Pembahasan

4.4.1. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021

Tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak parkir Kota Yogyakarta periode tahun 2018-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 4. 7
Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kota Yogyakarta Periode Tahun 2018-2021

Berdasarkan Gambar 4.7 di atas dijelaskan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir dari tahun 2018-2021 masuk dalam kategori sangat efektif, kecuali tahun 2019 karena jumlah realisasi penerimaan pajak parkir hanya mencapai 83% dari target yang telah ditentukan sehingga masuk dalam kategori cukup efektif.

4.4.2. Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta

Kontribusi dari penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta antara tahun 2018-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

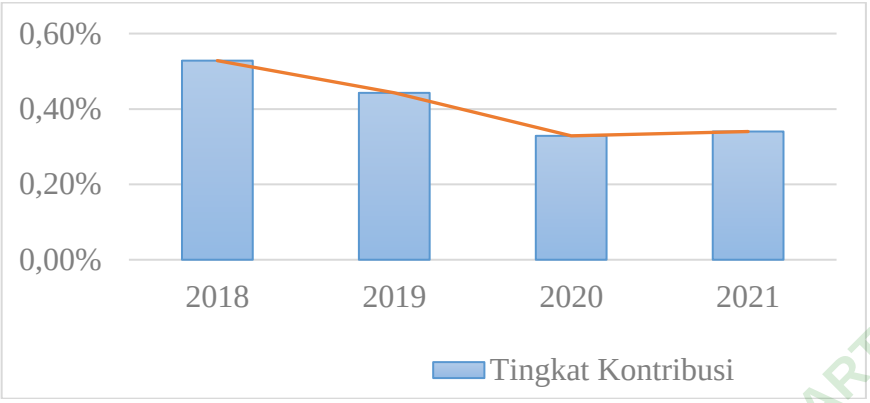

Gambar 4. 8
Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021

Berdasarkan Gambar 4.8 di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD dari tahun 2018-2021 selalu mengalami penurunan, namun apabila dibandingkan dua tahun pertama yaitu penurunan yang terjadi di tahun 2018-2019 tidak terlalu signifikan daripada tahun 2020-2021, hal ini disebabkan adanya covid-19 yang mulai muncul pada awal 2020 sehingga dilakukan pembatasan jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Yogyakarta oleh pemerintah kota sebagai upaya untuk memutus penularan covid-19.

4.4.3. Prosedur Penagihan BPKAD Kota Yogyakarta Untuk Menjaga Optimalisasi Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir

Berdasarkan hasil analisis data terkait prosedur penagihan di BPKAD Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa proses penagihan diawali karena terdapat tunggakan pembayaran pajak oleh wajib pajak parkir. Faktor yang berperan penting dalam keberhasilan dalam merealisasikan penerimaan pajak parkir adalah kesadaran wajib pajak sendiri. subbidang

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

penagihan dan keberatan akan menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan atau kesalahan perhitungan oleh wajib pajak sehingga mengakibatkan kurang bayar.

Kenyataan saat dilapangan, proses penagihan pajak tidak berjalan mulus setelah diterbitkan surat teguran. Kendala yang dialami BPKAD Kota Yogyakarta dalam melakukan proses penagihan adalah kurangnya kepatuhan serta kesadaran wajib pajak. Kendala tersebut yaitu berupa adanya ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak terutangnya tanpa adanya alasan yang mendukung, kemudian sengaja menunda pembayaran pajak dan wajib pajak tidak menepati janji untuk membayarkan pajaknya setelah diterbitkan surat teguran.

Pemantauan terhadap wajib pajak tetap dilakukan oleh subbbidang penagihan dan keberatan setelah diterbitkannya surat teguran. Apabila dalam kurun waktu 7 hari wajib pajak masih belum merealisasikan pajaknya maka proses penagihan selanjutnya yaitu dengan mendatangi wajib pajak yang bersangkutan secara langsung. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga realisasi penerimaan pajak parkir tetap optimal. Terbukti dengan adanya proses penagihan langsung kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA